

SINERGITAS BELA NEGARA DAN KEARIFAN LOKAL SIRI' UNTUK SISTEM PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERANG PROXY

THE SYNERGY OF DEFEND THE STATE AND SIRI' AS A LOCAL WISDOM FOR INDONESIAN DEFENSE SYSTEM TO CONFRONT PROXY WAR

Andi Mangeppe Manggabarani ¹

Universitas Pertahanan Indonesia
(andimangeppe@gmail.com)

Abstrak – Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya degradasi moral bangsa yang tidak lepas dari akulturasi dan masuknya budaya baru akibat dari globalisasi. Hal ini bisa dikategorikan sebagai ancaman non militer yang menjadi bagian dari agenda perang proxy yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Budaya siri' hadir sebagai nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat Bugis dan Makassar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, budaya siri' yang mengedepankan harkat dan martabat setiap individu dengan menjadi *tool of social control*, untuk mengendalikan perilaku masyarakat dari setiap penyimpangan. Budaya siri' dijadikan sebagai sumber nilai yang menjadi pertahanan negara dari segala jenis ancaman yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan untuk menghadapi ancaman proxy.

Kata Kunci : bela negara, Indonesia, kearifan lokal, perang proxy, siri'

Abstract – Indonesia currently faces regional and international threats. One of the problem coming when the morality of citizen is getting down which is affected by aculturation and globalization. It can be categorized as non-military threats, proxy war pursue to spwan disintegration in Indonesia. As a local wisdom, siri' exists within the society of Makassar and Buginess as a norm and guide to live the life. Following the dynamics of society, siri' puts forward the dignity of every person as a tool of social control, to regulate human's behavior. Siri' is created as source of value that can be considered to becomes defending the state and confronts proxy war that can impact disintegration in Indonesia.

Keywords: Indonesia, local wisdom, proxy war, state defense, siri'

¹ Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia tahun akademik 2017. Email: andimangeppe@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam. Selain itu, tanah Indonesia tergolong sangat subur sehingga pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan dengan baik dan menghasilkan produksi panen yang sangat melimpah. Di sektor perikanan, Negara Indonesia yang lebih dari 50% merupakan laut dan perairan menjadi modal utama bagi Indonesia sebagai salah satu penghasil ikan terbaik di dunia. Kekayaan alam bangsa Indonesia tentunya akan membuat iri negara tetangga yang hanya memiliki sumber daya alam yang terbatas dan lahan yang sempit untuk ditanami. Menghadapi anomali dan keadaan cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global, beberapa negara tentunya khawatir akan keterbatasan sumber daya mereka yang kelak tidak akan dapat mereka olah lagi. Oleh karena itu, tentunya Indonesia bisa saja menjadi sasaran bagi negara lain untuk diinvansi melalui suatu peperangan terlebih dahulu.

Di era *postmodern*, perang tidak lagi selalu diidentikkan dengan pertarungan senjata antara dua kubu yang saling berseteru. Sejarah menuliskan bahwa perang konvensional dengan menggunakan persenjataan mulai ditinggalkan mengingat biaya yang besar dengan korban yang tidak sedikit, ditambah dengan pertimbangan hak asasi dan berdirinya PBB sebagai pengawas yang membatasi setiap negara untuk

menginvansi negara lain. Perang dengan cara militer umumnya ditujukan atas dasar alasan *humanitarian intervention* dan kemudian menggulingkan rezim yang dinilai melakukan kejahatan kemanusiaan. Perang tidak terjadi hanya antar dua negara saja tetapi antar banyak negara perang tidak lagi hingar-bingar dan tidak mesti berdarah-darah.² Para negara yang sedang berkonfrontasi menggunakan pemain lain untuk menghindari perang secara *face-to-face* demi menghindari resiko kehancuran total. Ada aktor atau pihak lain yang non negara kekerasan dan atau tentara bayaran yang digunakan dalam perang yang ditujukan untuk menduduki negara lain dan kemudian menjajahnya secara fisik dan dikenal sebagai perang *proxy*.

Perang *Proxy* juga dikenal sebagai perang yang tidak diketahui siapa lawannya. Untuk menentukan definisi dari Perang *Proxy*, sangatlah penting untuk melihat bagaimana fenomena yang menjadi lingkup perang *proxy* berbeda dari jenis peperangan lainnya. Karakteristik yang paling mendasar adalah merujuk pada pihak ketiga yang secara aktif melancarkan serangan kepada negara lain dengan alasan adanya ketakutan atau kekhawatiran yang muncul namun sama sekali tidak terbatas pada doktrin skenario kepastian saling menghancurkan, atau *mutually assured destruction (MAD)*. Asumsi dasar berikutnya adalah bahwa ada hubungan

² Prabowo, J. S, Pada kuliah umum 'Sistem Pertahanan Semesta', Sentul: Universitas Pertahanan, 2017.

patron-klien dalam perang tersebut. Ini berarti bahwa ada hubungan kekuatan yang tidak setara antara para pelaku, bahwa ada pertukaran khusus (senjata, sumber daya atau perlindungan lainnya untuk mendapatkan imbalan jasa militer) yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Dengan menggunakan kedua asumsi ini, dapat dianggap bahwa peperangan di mana pihak ketiga yang turut mempersenjatai dan menyokong bantuan kepada salah satu pihak perang dikategorikan berada di luar definisi Perang Proxy, walaupun masih menjadi perdebatan. Sebagai contoh, dalam Perang Dingin, tidak jarang sekutu adikuasa bertindak sebagai proxy dan terlibat dalam operasi yang akan memberi senjata untuk melawan kubu lainnya. Dipercaya bahwa intervensi Kuba di Angola dan Ethiopia sebenarnya didukung oleh Uni Soviet untuk menghindari pengawasan dunia internasional.³

Kerangka Pemikiran

Soft Power dan Hard Power dalam Perang Proxy

Negara adidaya menjadi pemegang peranan penting dalam perang proxy terhadap sekelompok individu yang bukan merupakan bagian dari negara (*non-state actors*) dan pemerintah (*state holders*). Politik digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menguasai negara tersebut. Para pemegang peranan

³ S. B. Dandan, *On Proxy War*, Danish Political Science Association, (Copenhagen : University of Copenhagen), 2015, hlm. 5.

penting dalam perang memiliki tujuan untuk menguasai negara-negara yang dianggap memiliki cukup banyak sumber daya alam, utamanya energi. Dengan demikian politik yang dilakukan oleh negara-negara besar erat kaitannya dengan power sebagaimana adagium *all politics tend to power*.⁴

Pendekatan diterapkan oleh para negara adidaya dalam bentuk soft power maupun hard power. Soft power yang dilakukan dalam perang proxy adalah menggunakan pendekatan perangkat ekonomi (*Economy Power Approach*). Dengan ini menggunakan perangkat teknologi dan informasi sebagai bantuan (*aid*) atau donasi dari negara atau lembaga donor (yang juga didukung oleh negara donor) kepada negara berkembang yang dianggap memiliki sumber daya alam dan energi yang mumpuni, namun umumnya membutuhkan dana dan teknologi untuk mengelola kekayaan alam mereka. Sementara itu, negara yang relatif mapan melakukan intervensi secara militer, politik, dan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Intervensi tersebut dilakukan dengan perangkat militer (*military power*) atau perangkat politik (*political power*) dan merupakan bagian dari hard power.⁵

Kemudian dewasa ini, invasi terhadap negara lain bukan lagi dengan alasan sumber daya energi. Invasi tidak

⁴ Robert. A. Caro, *The Path to Power: The Years of Lyndon Johnson I*, (New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2011), hlm. 370.

⁵ M. Stillman, *Proxy Wars: The Business of War*, (Bloomington, Indiana: Trafford on Demand Pub, 2008), hlm. 19.

lagi dilakukan secara langsung dan terang-terangan mengingat telah banyak negara maju yang meninggalkan perang secara koservatif dengan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun dibalik itu, invasi ke negara lain tetap perlu dilakukan demi melindungi negara sendiri atas dasar nasionalisme negara bersangkutan, sehingga acap kali negara lain dijadikan sebagai korban. Invasi yang dilakukan, khususnya kepada negara yang masih berkembang dengan sumber daya alam yang masih melimpah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa degradasi kebudayaan dan moral bangsa merupakan salah satu bentuk perang proxy yang bertujuan untuk meruntuhkan semangat nasionalisme bangsa. Proses degradasi bisa dilakukan dengan cara akulturasi budaya dimana proses sosial terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan suatu budaya tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya asing yang sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur tersebut diolah dan diterima ke dalam budaya sendiri. Sebagai contoh, para pemuda harapan bangsa yang seharusnya menjadi pelopor dengan penuh prestasi dan semangat justru menjadi pemuda tanggung yang tidak dapat berpikir dengan jernih. Antara lain tindakan anarkis yang sering terjadi di kalangan mahasiswa saat berdemo, konflik SARA, tawuran dikalangan siswa, kenakalan remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan banyak lagi merupakan bentuk suksesi dari perang proxy yang berusaha untuk menjatuhkan suatu bangsa.

Bela Negara

Istilah 'Bela Negara' sebenarnya sudah ada jauh sebelum Presiden Jokowi mempopulerkan di tengah masyarakat. Konstitusi sendiri setidaknya menyebutkan secara *letterlecth* mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara dalam Pasal 27 ayat (3), dan secara implisit di dalam Pasal 30 ayat (1). Konsep bela negara tidak lepas dari sistem pertahanan Indonesia yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta (HANKAMRATA). Sistem pertahanan Indonesia tidak hanya melibatkan TNI sebagai pertahanan militer dan komponen utama, namun juga melibatkan rakyat Indonesia, wilayah, dan sumber daya nasional. Sumber daya nasional dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya yang telah yang ditingkatkan daya gunanya, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan sebagai komponen untuk mendukung pertahanan negara. Pengertian bela negara terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Pertahanan Negara yang mengatur bahwa bela negara upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan

rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Indikator kesadaran bela negara dapat diukur dari lima sikap dasar dalam bela negara, yaitu cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI; kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebhinekaan; yakin pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional; rela berkorban untuk nusa dan bangsa; serta memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan fisik.⁶ Kelima indikator tersebut dapat dikembangkan dalam masyarakat melalui pendidikan dan kaderisasi bela negara. Selain itu, kesadaran bela negara dapat ditumbuhkembangkan dengan pengenalan nilai-nilai kebangsaan dan pancasila pada usia dini. Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran dan kemampuan mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non militer maupun hibrida.⁷

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan), hlm. 30.

⁷ Kementerian Pertahanan, *Buku Strategi Pertahanan Negara 2015*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015), hlm. 53.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pertahanan Negara, hak dan kewajiban bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ketentuan tersebut diatur dengan undang-undang.

Dalam sistem pertahanan di Indonesia, ada tiga komponen yang dijadikan sebagai pilar penegakan sistem pertahanan, yakni komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Konsep bela negara merupakan implementasi Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan warga negara sebagai komponen cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara (Penjelasan UU Pertahanan Negara). Program bela negara berbeda dengan wajib militer. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, SDA/B, serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisir untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat Komput. Penyiapan dan pengorganisasian komponen cadangan dibentuk dalam satuan-satuan sesuai kebutuhan komponen utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan komponen utama.⁸

⁸ *Ibid.* hlm. 108.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.⁹ Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.¹⁰ Koentjaraningrat sendiri mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal itu kepada ide, aktivitas sosial, artifak.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran yang muncul ditengah masyarakat. Hal ini akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan anomali atau fenomena yang terjadi dan dianggap belum ada pemecahannya. Kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan berperan penting sebagai identitas jati diri bangsa.

Kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang lahir ditengah kehidupan masyarakat yang berbudaya telah ada sejak lama yang merupakan tindakan atau perilaku positif yang didalamnya memuat kebaikan-kebaikan. Bisa saja selain budaya juga bisa bersumber

dari nilai-nilai adat istiadat, agama dan terbangun secara ilmiah dan berkembang menjadi kebudayaan baru mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman yang dinamis. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dan berlaku secara universal dan parsial. Secara universal artinya nilai-nilai kearifan lokal diterima dan diakui oleh siapa saja atas eksistensinya, secara parsial sendiri berarti bahwa setiap daerah dan masyarakat tertentu memiliki kearifan lokal sendiri yang tetap dijaga tidak hanya sebagai sebuah tradisi, namun pedoman hidup.

Kearifan lokal tercipta sebagai *the guardian of values*, penjaga dari nilai-nilai kebudayaan agar tidak punah dan identitas diri suatu kelompok masyarakat tetap terjaga. Konstitusi sendiri mengakui kearifan lokal sebagai bentuk paradigma masyarakat yang tetap konsisten menjaga karakteristik kebudayaan mereka. Dalam pasal 18B ayat (2) diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam pasal 28I ayat (2) juga diatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Memaknai isi kandungan dua pasal di atas, dapatlah dipahami bahwa kearifan lokal sebagai hasil dari budaya akan tetap ada dan dihormati sesuai dengan perkembangan

⁹ Fajriani, U. (2014, Desember). "Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter", *Sosio Didaktika, Social Science Education Journal*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 3.

¹⁰ R. F.X, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009), hlm. 93.

¹¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Cet. XV)*, (Jakarta: Djambatan. 1995), hlm. 103.

zaman, dan yang menjadi kewajiban bagi para pemangku kebudayaan tadi adalah bagaimana menjaga dan memaknai kebudayaan itu sebagai bagian dari diri sendiri.

Pembahasan

Budaya Siri' Sebagai Salah Satu Kearifan Lokal Suku Bugis dan Makassar

Bugis dan Makassar adalah dua diantara empat etnis besar yang berada di Sulawesi Selatan. Pada hakekatnya kebudayaan dan pandangan hidup orang Bugis pada umumnya sama dan serasi dengan kebudayaan dan pandangan hidup orang Makassar. Oleh karena itu, membahas tentang budaya Bugis sulit dilepaskan dengan pembahasan tentang budaya Makassar. Kebudayaan Bugis dan Makassar yang dimaksud disini adalah totalitas hasil pemikiran dan tingkah laku yang dimiliki oleh masyarakat Bugis dan Makassar yang dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Hasil pemikiran tersebut berupa nilai-nilai budaya Bugis-Makassar yang telah diwujudkan dalam pola tingkah laku masyarakat Bugis-Makassar dalam kehidupan keseharian.¹²

Struktur masyarakat Bugis dan Makassar memiliki sejarah yang sangat penting terkait dengan pembangunan peradaban di kawasan selatan Sulawesi

¹² Erman Syarif dkk, "Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar Dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, Vol.1, No.1, April 2016, hlm. 15.

Selatan. Selain itu, masyarakat Bugis dan Makassar mengenal banyak unsur seni budaya khas seperti Lontara Makassar, Pasang, seni bahasa, dan karya-karya seni lainnya, termasuk kearifan lokal *siri'*. Searah dengan perkembangan waktu, orang dapat membangun lingkungan yang bervariasi sesuai hasil dari pemahaman mereka tentang iklim atau akibat budaya yang dipahami. Budaya yang dipahami masyarakat menjadi dasar dalam pembentukan lingkungan binaan.¹³

Suku Bugis dan Makassar dikenali sebagai suku yang kaya akan budaya dan kearifan lokalnya. Salah satu kearifan lokal yang banyak dikenal orang adalah *siri'* atau malu. *Siri'* berasal dari kalimat *siri'* (*tuna lanri anggaukanna anu kodi*) yang artinya malu apabila melakukan perbuatan yang tercela.¹⁴ *Siri'* dalam bahasa Bugis juga dimaknai sebagai rasa malu, harga diri dan gengsi. Kalimat *taro-taro siri' ri alemu* yang bermakna bahwa setiap tingkah laku harus menjaga rasa malu agar tidak berbuat yang dianggap tidak baik. Pandangan mengenai *siri'* juga diungkapkan oleh B. F. Matthes pada tahun 1873 yang ditemukan dalam surat La Siri menjelaskan bahwa istilah *siri'* diterjemahkan dengan malu, rasa kehormatannya tersinggung, dan sebagainya.¹⁵ Pengertian *siri'* juga

¹³ Syarif Beddu dkk, "Eksplorasi Kearifan Budaya Lokal Sebagai Landasan Perumusan Tatahan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Makassar", dalam temu ilmiah IPLBI 2014.

¹⁴ R. Darwis dan A. U. Dilo, "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa", *el Harakah*, Vol. 14, No. 2, 2012, hlm. 1.

¹⁵ M. R. Voorhoeve dan A. T. Gallop, "Indonesian Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in British Public Collection", (Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2014), hlm. 401.

diungkapkan oleh M. Natzir Said yang menyatakan bahwa *siri'* adalah perasaan malu yang memberi kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat, terutama dalam soal-soal hubungan perkawinan.¹⁶ Mattulada mengutip pendapat C.H. Salam menjelaskan bahwa ada tiga pengertian konsep *siri'*, yaitu malu, daya dorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan daya dorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin.¹⁷

Dahulu masyarakat Bugis dan Makassar memilih mati dari pada menanggung malu. Jika merasa tersinggung karena malu, mereka akan menggunakan *cara sitobo* atau *sigajang laleng lifa'* atau berkelahi menggunakan *kawali* atau badik kecil yang dilakukan oleh dua orang dan berduel dalam satu sarung. Hal ini menjadi bukti bahwa orang Bugis dan Makassar lebih memilih mati dari pada harga dirinya tercoreng. Saat ini, sudah jarang ditemui orang Bugis atau Makassar membunuh karena alasan *siri'*. Hal ini karena perkembangan masyarakat dan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia mengatur tentang larangan main hakim sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siri'* adalah suatu kearifan lokal yang mencakup nilai-nilai sosial dan budaya. *Siri'* melambangkan kepribadian suku Bugis dan Makassar yang menjadi

pedoman dalam hidup bermasyarakat, pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

Sinergitas Bela Negara dan Kearifan Lokal *Siri'* untuk Sistem Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Perang Proxy

Sebagai negara yang tergolong sebagai *'imagine community'*, konsep keindonesiaan tidak lepas dari adanya bentuk perasaan senasib karena pernah dijajah dan semangat untuk menegakkan perdamaian dunia sebagaimana yang telah dicita-citakan para pendiri bangsa. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda. Namun terlepas dari hal tersebut, tiap-tiap kearifan lokal merupakan nilai yang lahir dari jiwa kebenaran dan kebaikan dalam masyarakat yang berkembang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. *Siri'* merupakan sebuah pegangan hidup masyarakat Bugis dan Makassar yang mengajarkan bagaimana caranya menjalani kehidupan bermasyarakat.

Globalisasi yang sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan nilai-nilai mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa. Pengaruh globalisasi tidak hanya berdampak terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun juga mempengaruhi paradigma para generasi muda dalam

¹⁶ Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 88.

¹⁷ Latoa Mattulada, *Satu Lukisan Analitik Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Cet. II), (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 37.

menghadapi tantangan kedepan. Selain itu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa saja membawa nilai-nilai yang bersinggungan dengan nilai-nilai bangsa yang sudah ada.

Penerapan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari peran penting negara dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki fungsi atau posisi sebagai subjek pengatur masyarakat. Fungsi yang dimaksud di sini bisa saja berupa kewenangan pemerintah yang dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi. Pemerintah haruslah berperilaku sesuai dengan status dan perannya yang telah diatur dalam undang-undang. Peranan pemerintah tertuang dalam lembaga-lembaga yang memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Harapan dan keinginan merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlandaskan pada nilai kearifan lokal, seseorang yang telah memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya mahasiswa, tidak hanya diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan peran mereka masing-masing, namun juga tetap berpatokan terhadap nilai yang telah ditetapkan agar senantiasa selalu dalam kebaikan.

Berbicara mengenai konsep peran, ide Sishankamrata menganut pemikiran bahwa rakyat memiliki peran pokok yang diikutsertakan dalam komponen pertahanan kesemestaan. Baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Hal ini tidak lepas dari amanah konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya.

Budaya *siri'* dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk semangat bela negara untuk memerangi perang proxy yang ada saat ini. Budaya malu bisa dijadikan sebagai *tool of social control* dan *tool of social engineering* khususnya bagi para pemuda. Rasa malu yang ditanamkan dalam diri seseorang akan menjadi kontrol bagi para pemuda untuk tidak mengikuti tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan moral bangsa. Dalam seminar yang bertajuk "Mengolah Masalah *Siri'* di Sulawesi Selatan Guna Peningkatan Ketahanan Nasional dalam Menunjang Pembangunan Nasional" dijelaskan tentang konsep dan batasan tentang *siri'* sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ A.M, M.G, *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri' Na Pacce*, (Ujung Pandang: Mapress, 1990), hlm. 17.

Daftar Pustaka

Buku

- Dandan, S.B. 2015. *On Proxy War. Danish Political Science Association Copenhagen: University of Copenhagen.*
- F.X, R. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata.* Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Cet. XV).* Jakarta: Djambatan.
- _____, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Aksara Baru.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015.* Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Strategi Pertahanan Negara 2015.* Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- M.G, A. M. 1990. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri' Na Pacce.* Ujung Pandang: Mapress.
- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Analitik Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet. II).* Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Prabowo, J. S. 2017. *Sistem Pertahanan Semesta.* Sentul: Universitas Pertahanan.
- Robert. A. Caro. 2011. *The Path to Power: The Years of Lyndon Johnson I.* New York: Knopf Doubleday Publishing Group.
- Stillman, M. 2008. *Proxy Wars: The Business of War.* Bloomington, Indiana: Trafford on Demand Pub.
- Voorhoeve, M. R., & Gallop, a. T. 2014. *Indonesian Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in British Public Collection.* Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Jurnal

- Darwis, R., & Dilo, A. U. 2012. "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa". *el Harakah.* Vol. 14. No. 2.
- Erman Syarif dkk. 2016. "Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar Dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS.* Vol. 1. No.1.
- Fajriani, U. 2014. "Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter". *Sosio Didaktika. Social Science Education Journal.* Vol. 1. No. 2.

Lain-lain

- Beddu, Syarif dkk. 2014. "Eksplorasi Kearifan Budaya Lokal Sebagai Landasan Perumusan Tatanan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Makassar". *Temu Ilmiah IPLBI 2014.*